Judul : Seminar Hasil Penelitian Penataan Wewenang dan Tugas MPR

Kategori : Event

Publish : 06 Dec 2019

Link : https://fh.fhunmul.com/article/read/12-06-2019-seminar-hasil-penelitian-penataan-wewenang-dan-tugas-mpr



Sepanjang perjalanan sistem ketatanegaraan di Indonesia, satu dari sekian banyak lembaga negara yang mendapatkan banyak sorotan publik karena kedudukan dan wewenangnya dalam sistem ketatanegaraan Indonesia adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), oleh karena itu Fakultas Hukum bekerjasma dengan Sekretariat Jendral Badan Pengkajian MPR-RI menyelenggarakan “Seminar Hasil Penelitian Kajian Akademik Penataan Wewenang dan Tugas MPR dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia”. Selasa, 3 Desember 2019,bertempat di Aula Gedung B Lantai 3, yang diikuti oleh 100 mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Mulawarman.

Dalam seminar ini menghadarikan narasumber dari Akademisi Fakultas Hukum Dr. Rosmini, SH., MH, Harry Setya Nugraha, SH., MH, dan Akademisi Fakultas Syariah IAIN Samarinda Dr. H. Murjani, SH., MH, yang menyampaikan bahwa pengaturan lebih lanjut mengenai MPR dapat diatur dengan undang-undang. Pengaturan lebih lanjut mengenai MPR yang dapat diatur dengan undang-undang bukan hanya pengaturan mengenai kedudukan MPR semata, tetapi juga kewenangannya. Oleh karena itu, UUD 1945 membuka ruang terhadap pengaturan kewenangan MPR, yang bertujuan untuk mencapai konsistensi visi dalam sistem perencanaan pembangunan Nasional.

Yang saat ini dibutuhkan bangsa Indonesia dalam sistem perencanaan pembangunan Nasional adalah konsistensi visi. Oleh sebab itu perlu adanya penataan wewenang MPR itu sendiri sebagai lembaga negara.



Foto 1: Lampiran Foto 1


Foto 2: Foto bersama dengan seluruh peserta seminar.